

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN TIPE
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA DI PULAU JAWA**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Reza Yulianto

112031537

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
OKTOBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN TIPE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

REZA YULIANTO

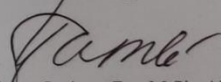
No. Induk Mahasiswa: 112031537

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



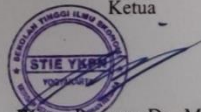
Bambang Suropto, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Dheni Indra Kusuma, SE., M.Si., Ak., CA., CFP.

Yogyakarta, 18 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan tipe pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2022. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 113 data statistik dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah, luas wilayah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah, dan pemerintah daerah kota lebih mandiri dibandingkan pemerintah daerah kabupaten. Variabel independen jumlah penduduk, luas wilayah, dan tipe pemerintah daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 64,9% melalui koefisien determinasi.

Kata kunci: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tipe Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research examines the influence of the variables population size, an area, and type of regional government on the level of regional financial independence in district and city regional governments on the island of Java in 2022. The sampling technique in this research uses techniques purposive sampling with a total sample of 113 statistical data and reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of regional governments on the island of Java. This research uses data analysis techniques with multiple linear regression to determine the influence of the independent variable on the dependent variable. The results of this research show that population size has a positive effect on the level of regional independence, area size has a negative effect on the level of regional independence, and city regional governments are more independent than district regional governments. The independent variables of population, area and type of regional government are able to explain the dependent variable, namely the level of regional financial independence of 64.9% through the coefficient of determination.

Keywords: Population, Area, Type of Regional Government, Level of Regional Financial Independence

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebelum era reformasi pemerintah masih menerapkan sistem ekonomi terpusat atau sentralisasi. Sistem penyelenggaraan pemerintah ini sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi bagi pemerintah daerah. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sistem sentralisasi digantikan menjadi desentralisasi atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya perubahan sistem tersebut pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mengelola keuangan wilayahnya sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam menjalankan kewenangan yang mereka miliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah sehingga pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Defitri, 2020).

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat (Nurkhayati, 2021). Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diukur melalui seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh setiap pemerintahan kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah sehingga dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara lebih efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah. . .

Tipe pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Namun, penelitian terkait pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini merupakan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menduga bahwa tipe pemerintahan daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, karena terdapat perbedaan aspek demografis dan geografis tiap pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah setempat dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemandirian suatu daerah yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Tipe

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2022?
2. Apakah luas wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2022?
3. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2022?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2022.
2. Menguji pengaruh luas wilayah terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2022.
3. Menguji pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2022.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai salah satu sumber referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh jumlah penduduk, luas wilayah dan tipe pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian suatu daerah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Pulau Jawa untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga tidak bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat dan mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerahnya.

Kontribusi Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adha & Usman (2020) berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemandirian di Kota Palopo”. Dengan menambahkan tipe pemerintah daerah sebagai variabel bebas, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan antara pemerintah daerah dan kota sehingga hasil dari penelitian ini mengetahui pemerintah daerah manakah yang lebih mandiri. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan daerah sehingga mampu mendanai wilayahnya sendiri dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Jumlah penduduk pada suatu daerah memiliki beberapa peran yang berbeda, selain dapat menjadi produsen, penduduk juga dapat menjadi konsumen. Populasi penduduk yang besar akan meningkatkan penawaran dan permintaan dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat menguntungkan banyak pihak. Semakin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah maka akan berdampak terhadap penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah (Alfi & Sari, 2023).

Pernyataan tersebut didukung oleh Adha & Usman (2020) melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

B. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Luas wilayah mencerminkan skala dari sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Luas wilayah dapat diukur berdasarkan total aset yang dimilikinya dalam suatu periode. Menurut Gomes et al., (2013) kota yang lebih

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

besar cenderung mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya dibandingkan dengan kota yang lebih kecil.

Pernyataan tersebut didukung oleh Rofiq & Arza (2021) melalui hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Luas wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

C. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah otonom di Indonesia dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Namun, terdapat perbedaan karakteristik terkait aspek demografis dan geografis antara pemerintah daerah kabupaten dengan kota sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan sumber potensi penerimaan daerah yang dapat dikelola dan dioptimalkan dalam suatu pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Prasasti et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh data sekunder yang tersedia pada *website* bps.co.id pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa terkait jumlah penduduk, luas wilayah dan tipe pemerintah daerah serta mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2022. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Desember tahun 2023.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal atau menetap pada suatu wilayah yang berusia 1 – 65 tahun pada tahun 2022. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistika (BPS) atau *website* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Luas Wilayah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk menghitung indeks luas wilayah suatu daerah yaitu dengan membandingkan luas wilayah daerah dengan rata-rata luas wilayah secara nasional. Rumus untuk menghitung indeks luas wilayah:

$$\text{Indeks Luas Wilayah Daerah} = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

Tipe Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini, tipe pemerintah daerah diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Indikator dalam pengukuran variabel penelitian ini adalah “1” untuk pemerintah daerah kabupaten dan “0” untuk pemerintah daerah kota.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

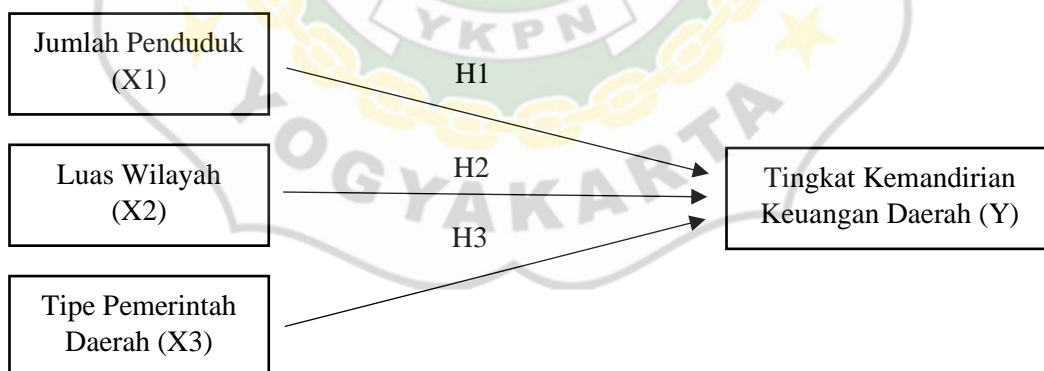
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat melalui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah dengan cara:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer ke Daerah}} \times 100\%$$

Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teori dan pengembangan hipotesis yang telah penulis uraikan di atas, model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel dan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut adalah uraian terkait beberapa uji tersebut.

Uji Normalitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

Nilai Signifikan	Tingkat Signifikan	Keterangan
0,084	0,05	Normal

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
JP	0,780	1,282
LW	0,540	1,852
TPD	0,629	1,589

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.
JP	0,095
LW	0,384
TPD	0,805

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Autokorelasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,797	0,636	0,626	0,18706	1,899

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
JP	113	121675	5320346	1169879,81	799717,826
LW	113	0,00	1,02	0,1990	0,17195
TPD	113	0	1	0,74	0,439
TKKD	113	0,11	1,47	0,3917	0,31296

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	<i>(Constant)</i>	0,493	0,039		12,524	0,000
	JP	2,630E-7	0,000	0,672	10,467	0,000
	LW	-0,606	0,140	-0,333	-4,317	0,000
	TPDD	-0,388	0,051	-0,544	-7,605	0,000

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji terkait kebenaran suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini peneliti menguji hipotesis menggunakan hasil uji f hitung, koefisien determinasi dan uji t hitung.

Uji F

Tabel 4.6 Hasil Uji F

ANOVA						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	7,123	3	2,374	67,276	0,000
	<i>Residual</i>	3,847	109	0,035		
	<i>Total</i>	10,970	112			

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,806	0,649	0,640	0,18786

Uji T

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Model	<i>Unstandarized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
-------	-----------------------------------	----------------------------------	----------	-------------

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,493	0,039		12,524	0,000
	JP	2,630E-7	0,000	0,672	10,467	0,000
	LW	-0,606	0,140	-0,333	-4,317	0,000
	TPDD	-0,388	0,051	-0,544	-7,605	0,000

Pembahasan Hasil Uji

Peneliti telah melakukan beberapa macam jenis uji pada penelitian ini. Berikut merupakan pembahasan terkait hasil uji yang akan disampaikan melalui uraian.

A. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada pengujian H1 memperoleh hasil bahwa variabel jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif yang memiliki arti bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini dibuktikan melalui hasil dari t hitung $2,630E-7 > t$ tabel $1,982$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Melalui hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya jumlah penduduk pada suatu pemerintah daerah dapat mendorong penerimaan pendapatan daerah dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah..

B. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada pengujian H2 memperoleh hasil bahwa variabel luas wilayah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif yang memiliki arti bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil dari t hitung $-4,317 > t$ tabel $-1,982$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Melalui hasil penelitian ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengindikasikan bahwa dengan luasnya wilayah pada suatu daerah, pemerintah daerah setempat belum mampu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

C. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Melalui pengujian H3 diperoleh hasil bahwa variabel tipe pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif yang memiliki arti bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil dari t hitung $-7,605 > t$ tabel $-1,982$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah kota.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pengujian dalam penelitian ini telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah..
2. Variabel luas wilayah berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Variabel tipe pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya melakukan pengamatan pada tahun 2022, hal ini dikarenakan luas wilayah pada suatu pemerintah daerah tidak berubah setiap tahunnya.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen jumlah penduduk, luas wilayah dan tipe pemerintah daerah untuk. Sementara terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Saran

Melalui beberapa hasil temuan dan keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambah waktu pengamatan dan menambahkan variabel independen lain yang relevan dalam menguji pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karena dengan menambah waktu pengamatan serta menambahkan beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, penelitian selanjutnya dapat membandingkan hasil pengujian dari tahun ke tahun dan mengetahui variabel independen lain yang diperkirakan mampu mempengaruhi tingkat kemandirian seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada suatu pemerintah daerah.

Saran untuk pemerintah daerah, peneliti berharap pemerintah daerah kabupaten maupun kota mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dengan mengelola atau mengoptimalkan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga hal ini dapat meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, N., & Usman, H. (2020). Pengaruh Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Palopo. *Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on The Financial Performance of Districts and Cities in The Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250.
<https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 105–113.
<http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No.
- BPK Aceh. (2021, June 25). *Belum Mandiri, 88 Persen Pemda Bergantung pada Transfer Pusat*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<https://aceh.bpk.go.id/belum-mandiri-88-persen-pemda-bergantung-pada-transfer-pusat/>
- Darmanto, H. C. (2013). Pengaruh Population, Employment, Size, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Universitas Negeri Sebelas Maret*.
- Datanesia. (2023, March 14). *Persoalan Pemerintah Daerah: Tidak Ada yang Mandiri*. Datanesia. <https://datanesia.id/persoalan-pemerintah-daerah-tidak-ada-yang-mandiri/>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 19(2), 107–119.
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., McCloskey, D., Olson, M., Perrow, C., Tricker, R., & Whetten, D. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. In *Australian Journal of Management* (Vol. 16).
- Ervannudin, N., & Widodo, B. W. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, Vol. 1.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Gomes, R. C., Alfinito, S., Henrique, P., & Albuquerque, M. (2013). *Analyzing Local Government Financial Performance: Evidence from Brazilian Municipalities 2005-2008*. <http://www.anpad.org.br/rac>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Harbowo, N. (2022, April 25). *26 Tahun Otonomi Daerah, Daerah Masih Terus Bergantung pada Pusat*. PT Kompas Media Nusantara.
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3, 312–328.
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Dipengoro Journal of Accounting*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, Vol. 1.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (3rd ed.). PT Rineka Cipta.
- Nurkhayati, E. D. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri*.
- Oktavia, C. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Pandeya, G. P., & Oyama, T. (2019). Revitalizing Local Government Performance Management: Further Dissecting the Role of Socioeconomic Status and Social Mobilization Policy. *Local Government Studies*, 45(6), 869–892. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1585817>
- Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 94–103. www.otda.kemendagri.go.id
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 3, 705–719.
- Sudjana. (1992). *Metode Statistika*. Tarsito.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulangi, P. G., Anwar, C., & Ulupui, I. G. K. A. (2022). The Effect Of General

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Allocation Funds, Economic Growth, And Area On The Level Of Financial Independence Of The Provincial Government Regions In Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 3(2), 328–338.

<http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa>

Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2016). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*, 24 No. 1, 25–34.

Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(03).

Walpole, R. E. (1995). *Pengantar Statistika* (3rd ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

